

ABSTRACT

Work accidents are conditions that occur in an employment relationship which include illnesses and accidents caused by work activities that occur at work, from residence to work and returning from work to residence. Working fishermen is a job that has a high risk of work accidents, including working fishermen in Tuban District. In their daily lives, these fishermen workers are not yet protected by BPJS Employment social security. On that basis, we can see the responsibility role of fishermen who own ships as employers, whether they have been fully responsible or have only fulfilled some obligations and have complied with statutory regulations.

The type of research carried out is empirical legal research or field research, namely a study of existing norms and their implementation in society and uses a factual approach by looking directly at real situations based on statutory regulations. In this research, primary and secondary data sources are used with collection techniques. data conducted by interviews and literature study. Data analysis used descriptive methods. The research location is in the coastal area in Tuban District.

Fishermen who own boats in Tuban District as employers are obliged to register their workers in the employment social security managed by BPJS Employment according to the provisions of Article 15 paragraph (1) of the BPJS Law. However, in reality, working fishermen do not receive social employment security. Fisherman workers have asked employers for their right to protection for employment social security to be registered with the BPJS Employment program, but employers have not responded to workers' requests. As an effort to prevent work accidents and to minimize the risk of work accidents according to the provisions of Law No. 1 of 1970 concerning Work Safety, PPE must be provided. Some fishermen who own boats still do not provide complete PPE for the safety of the working fishermen. Then fishermen who experience work accidents will be rushed to the nearest hospital. Meanwhile, the form of employer responsibility is that the employer bears part and/or all of the hospital costs of workers who experience work accidents until they recover. For legal accountability, providing BPJS Employment guarantees has not been fulfilled due to certain factors. Employers can also be given administrative or criminal sanctions if they are proven to have violated the rights of their workers.

Keywords: *Labor fishermen, employer accountability, boat owner fishermen, Tuban District.*

ABSTRACT

Kecelakaan kerja merupakan keadaan yang terjadi dalam suatu hubungan pekerjaan yang meliputi penyakit dan kecelakaan yang disebabkan aktivitas pekerjaan yang terjadi dalam pekerjaan, dari tempat tinggal menuju tempat kerja serta kembalinya dari tempat kerja menuju tempat tinggal. Nelayan buruh merupakan pekerjaan yang memiliki resiko kecelakaan kerja yang tinggi, tak terkecuali para nelayan buruh di Kecamatan Tuban. Dalam kesehariannya para nelayan buruh ini belum dilindungi oleh jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Atas dasar itu, maka peran pertanggungjawaban nelayan pemilik kapal sebagai pemberi kerja dapat kita lihat apakah telah bertanggungjawab secara penuh atau hanya memenuhi beberapa kewajiban dan telah berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan yaitu kajian mengenai norma yang ada serta pemberlakuannya di masyarakat serta menggunakan pendekatan fakta dengan melihat langsung keadaan secara nyata didasarkan pada peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dengan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ada di wilayah pesisir di Kecamatan Tuban.

Para nelayan pemilik kapal di Kecamatan Tuban sebagai pemberi kerja berkewajiban mendaftarkan para pekerjanya dalam jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Namun pada kenyataannya, para nelayan buruh belum mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nelayan buruh telah meminta hak perlindungan atas jaminan sosial ketenagakerjaan pada pengusaha untuk didaftarkan program BPJS Ketenagakerjaan, namun pengusaha tidak memberikan respon atas permintaan pekerja. Sebagai upaya penanggulangan terjadinya kecelakaan kerja dan untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja menurut ketentuan UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, wajib disediakan APD. Beberapa Nelayan pemilik kapal masih belum menyediakan APD yang lengkap terhadap keselamatan kerja nelayan buruh. Kemudian bagi para nelayan yang mengalami kecelakaan kerja akan dilarikan ke Rumah sakit terdekat. Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pemberi kerja yaitu pengusaha menanggung sebagian dan/atau seluruhnya biaya rumah sakit pekerja yang mengalami kecelakaan kerja sampai pada keadaan pemulihan. Untuk pertanggungjawaban secara hukum, dengan memberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan belum terpenuhi oleh sebab factor tertentu. Pengusaha juga dapat diberikan sanksi administrative maupun pidana apabila telah terbukti melakukan pelanggaran atas hak-hak para pekerjanya.

Kata Kunci : Nelayan Buruh, Pertanggungjawaban pemberi kerja, nelayan pemilik kapal, Kecamatan Tuban.